



Pranatan Anyar



KR-Dedy EW

Penampilan Dagelan Mataram di Manglung, Patuk, Gunungkidul.

KASUS POSITIF COVID-19 MASIH TINGGI

DPRD DIY Belum Rekomendasikan Pembelajaran Tatap Muka

YOGYA (KR) - Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menilai, wacana sekolah atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Januari 2021 nanti belum memungkinkan dilakukan di DIY. Hal ini berdasarkan perkembangan kasus positif Covid-19 yang masih tinggi dan belum menunjukkan penurunan.

“Memang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini membebani semua pihak. Baik siswa, sekolah sampai orangtua. Namun, berdasarkan kondisi saat ini, kita belum bisa merekomendasikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) atau luring,” katanya, Rabu (16/12).

Huda menyampaikan, hingga kini kasus positif Covid-19 di DIY belum bisa dikendalikan. Bahkan sejumlah rumah sakit mulai kekurangan fasilitas rawat inap dan tidak jarang sampai menimbulkan

antrean. Untuk itu, pihaknya masih akan melihat situasi di lapangan terlebih dahulu seperti apa.

PJJ yang sudah berjalan satu semester ini menurut Anggota Komisi D DPRD DIY Rany Widayati, memang menimbulkan sejumlah keluhan dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk diteruskan. Sebab sudah menimbulkan kejenuhan, baik dari peserta didik maupun orangtua.

“Memang tidak bisa begitu saja Pembelajaran Tatap Muka diputus-

kan, karena harus memperhatikan protokol kesehatan. Untuk itu, persiapan harus dilakukan secara matang. Baik dari sekolah maupun peserta didik itu sendiri. Dan harus ada kesepakatan bersama antara sekolah,” ungkapnya.

Ditegaskan Rany, jika ada satu saja orangtua tidak setuju PTM dilakukan, maka harus ditunda. Tentu harus ada komunikasi, antara sekolah dengan orangtua tersebut. Apa alasan tidak setuju dan segera dicarikan solusinya.

“Ini penting. Di sisi lain, Pembelajaran Tatap Muka baik untuk tumbuh kembang anak. Namun, jika ada satu saja orangtua yang tidak setuju. Ya, tidak boleh. Segera cari solusi terbaiknya seperti apa, sehingga tidak ada salah-salahan,” urainya. **(Awh)-d**

CEGAH KLAS TER SEKOLAH

Satuan Pendidikan Agar Perketat Prokes

KULONPROGO (KR) - Satuan pendidikan di Kabupaten Kulonprogo diingatkan agar memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan sekolah. Hal ini diperlukan supaya tidak muncul klaster sekolah seperti yang telah terjadi di salah satu sekolah di Dusun Pergiawatu, Kalurahan Srikayangan, Kapanewon Sentolo.

“Penerapan protokol kesehatan harus ketat. Bila didapati guru atau tenaga kependidikan yang terpapar positif Covid-19, segera menghubungkan petugas kesehatan dan menceritakan riwayat kontak,” tandas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulonprogo Arif Prastowo SSos MSI,

Selasa (15/12).

Pertemuan antarguru, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Kelompok Kerja Guru Pelajaran ataupun yang lain secara tatap muka agar diminimalkan, bisa lewat daring. Cara ini untuk meminimalisasi potensi penularan. “Kami sejak pekan lalu sudah memberikan Surat Edaran peningkatan kewaspadaan Covid-19 kepada satuan pendidikan,” jelasnya.

Dituturkan Arif, untuk pembelajaran tatap muka yang rencananya dilakukan Januari 2021, akan melihat dulu situasi dan kondisinya. Kegiatan itu bisa atau tidaknya terlaksana mendasarkan beberapa pertimbangan termasuk situasi perkembangan Covid-19.

FAKTOR KOMOR BID

Picu Kematian Kasus Covid-19

TEMANGGUNG (KR) - Kematian kasus Covid-19 di Kabupaten Temanggung telah mencapai 100 orang. Bertambah 50 orang selama periode satu bulan terakhir. Kematian tersebut disebabkan faktor komorbid, usia dan keparahan penyakit.

“Dinas Kesehatan dan RSUD yang secara teknis mengetahui penyebab kematian, namun memang dalam beberapa waktu terakhir meningkat,” kata Sekretaris III Satgas Penanganan Covid-19 Temanggung Dwi Sukarnei, Rabu (16/12).

Dwi mengatakan, di sisi lain tingkat kesembuhan pasien juga termasuk tinggi, sebab pasien lekas tertangani karena cepat dibawa dan mendapat perawatan kesehatan di rumah sakit. Warga yang terkonfirmasi juga diminta untuk isolasi mandiri agar tidak menular ke warga lainnya. Total konfirmasi positif saat ini sebanyak 2.254 kasus, dengan kesembuhan 1.950 kasus, jumlah meninggal 100 kasus, dirawat di rumah sakit 57 kasus dan yang menjalani isolasi mandiri 147 orang.

Sejak 15 Desember, kata Dwi, Temanggung sudah kembali masuk zona oranye. Karena dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir ini kasus Covid-19 di Temanggung mengalami penurunan sangat signifikan.

Namun, lanjutnya, jika hasil PCR dari 1.453 sampel yang dikirim di laboratorium ternyata banyak yang positif, bisa jadi kembali ke zona merah. **(Osy)-d**

KASUS KEMATIAN DAN INFEKSI TINGGI

Mulai 2021, Izin Hajatan Ditunda

KARANGANYAR (KR) - Pemerintah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar tak memberi izin penyelenggaraan hajatan mulai 1 Januari 2021. Kebijakan ini untuk menekan penyebaran Covid-19 yang dipicu aktivitas kerumunan masyarakat.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Camat Karanganyar No 300/607.3/XII/2020 tentang Penyelenggaraan Hajatan atau Keramaian. Di dalamnya memuat tiga poin penting, yakni penyelenggara acara hanya boleh mengundang maksimal 50 tamu yang tak boleh datang bersamaan dan seluruhnya wajib menerapkan protokol kesehatan. “Poin pertama ini berlaku hanya sampai 31 Desember 2020,” kata Camat Karanganyar Parman kepada KR, Rabu (16/12).

Poin kedua, Pemerintah Kecamatan Karanganyar merekomendasi penundaan hajatan sampai situasi memungkinkan. Rekomendasi ini berlaku mulai 1 Januari 2021. Seluruh Pimpinan Forkopimcam dan lurah se-Kecamatan Karanganyar diminta mematuhi. Sedangkan poin ketiga, masyarakat dan perangkat Pemerintah Kelurahan diimbau mengoptimalkan fungsi Jogo Tonggo.

Mengenai pengetatan hajatan di Karanganyar, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karanganyar Yophie Eko Jatiwibowo mengapresiasi ketegasan camat. Menurutnya, sanksi dan denda bagi pelanggar protokol kesehatan kurang efektif. **(Lim)-d**

Mobile Lab BSL-2 Percepat Proses 3T

JAKARTA (KR) - Peluncuran Mobile Laboratorium Biosafety Level 2 (Lab BSL-2) diharapkan mampu membantu proses 3T (*tracing, testing, treatment*) di beberapa daerah untuk mempercepat upaya penanganan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Hal itu dikemukakan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza di hadapan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo, saat melepas keberangkatan Mobile Lab BSL-2 varian bus di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (16/12).

Doni Monardo mengapresiasi hasil inovasi karya anak bangsa dalam rangka mempercepat pe-



KR-Istimewa

Peluncuran Mobile Lab BSL-2.

nanganan Covid-19 ini. Dengan hadirnya Mobile Lab BSL-2 dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar negeri, sehingga sekaligus dapat menjadi solusi lebih efektif dan efisien.

“Untuk *testing, tracing, treatment* yang juga kita bisa mengimprovisasi dengan *tracking* yang saat ini juga kita sedang upaya-

kan pengembangan aplikasi,” jelas Hammam.

Selain itu, kehadiran Mobile Lab BSL-2 sebagai salah satu hasil inovasi dari Peneliti dan Perekraya BPPT itu juga dapat membantu peningkatan kapasitas uji sampel specimen Covid-19 di daerah, sehingga prosesnya dapat lebih dipercepat, dipersingkat dan lebih akurat.

Hingga saat ini kapasitas pengujian sampel Covid-19 sudah mencapai 95 persen dari target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), namun ada beberapa wilayah yang mengalami kesulitan dalam pengujian sampel. “Kapasitas pengujian di Indonesia saat ini telah mencapai 95 persen dari yang ditargetkan WHO. Namun sebagian laboratorium masih terpusat di beberapa kota besar dan masih menunggu waktu di dalam pengujian specimen tersebut,” ujar Hammam.

Hammam Riza juga menjelaskan, Mobile Lab BSL-2 varian bus tersebut masih mengusung konsep yang sama, yaitu mobile, aman, dan akurat. “Memiliki konsep yang sama dan dibangun dengan upaya penyempurnaan,” kata Hammam. **(Ati)-d**

DUKUNG PENCEGAHAN COVID-19

Pentas Dagelan Mataram Secara Virtual

GUNUNGKIDUL (KR) - Ikut mendukung pencegahan penyebaran Covid-19, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan pentas dagelan secara virtual di Resto Manglung, Patuk. Dengan pertunjukan secara virtual ini masyarakat dapat menyaksikan secara online.

“Melalui pentas Dagelan Mataram ini untuk mengenalkan potensi seniman Gunungkidul. Karena sudah dibentuk kurang lebih satu tahun yang lalu,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Gunungkidul Agus Kamtana MM, Rabu (16/12).

Kamtana mengatakan, pelaksanaan pentas seni budaya di masa pandemi

Covid-19 ini tentu saja berbeda dengan kondisi sebelum pandemi. Mau tidak mau, semua pihak harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, mulai mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Dinas Kebudayaan memiliki tugas untuk melestarikan seni adat dan tradisi. Dalam hal ini, Dagelan Mataram merupakan salah satu seni tradisi yang harus tetap dilestarikan, karena merupakan kesenian dari Yogyakarta. “Harapannya tentu dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi penerus, sehingga pentas seni Dagelan Mataram Gunungkidul akan tetap eksis,” ujarnya. **(Ded)-d**

POTENSI PENULARAN TINGGI

Patuhi Prokes, Jauhi Kerumunan

BANYUMAS (KR) - Penularan Covid-19 di Kabupaten Banyumas masih tinggi. Bahkan Banyumas saat ini masuk zona merah, dengan *positivity rate* Covid-19 sudah mencapai di angka 12 persen.

“Tingginya *positivity rate* di Banyumas ini mencerminkan masih banyak penularan Covid-19 yang terjadi di masyarakat. Bahkan kemarin dalam sehari ada 287 orang yang positif dan empat orang meninggal,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banyumas Sadiyanto, Rabu (16/12).

Untuk itu ia meminta agar masyarakat serius dan disiplin mematuhi protokol ke-

sehatan (prokes) serta menjauhi kerumunan dalam setiap kegiatan karena potensi kerawanan tertular sangat tinggi.

Menurutnya, jika masyarakat lengah, maka secara langsung akan membuka kesempatan untuk tertular dan menulari orang-orang terdekatnya.

Sadiyanto mengungkapkan, selama sepekan kemarin Banyumas sempat masuk zona oranye. Kemudian kembali menjadi zona merah, karena kasus positif melonjak tajam. Peningkatan penularan Covid-19 di Banyumas jauh dari yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 5 persen. **(Dri)-d**

DIY Tunggu Juknis Vaksinasi Covid-19

YOGYA (KR) - Pemda DIY terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Sejauh ini Pemda DIY belum mendapatkan kepastian rincian siapa saja yang akan mendapatkan vaksin secara gratis maupun yang harus melakukan vaksinasi mandiri.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan petunjuk teknis (juknis) tentang Program Vaksinasi Covid-19 khususnya mengenai siapa saja yang mendapatkan secara gratis dan yang mandiri. Pemda DIY baru menerima informasi soal kriteria penerima Vaksin Covid-19. Jadi kalau ditanya siapa yang nanti mendapatkan vaksinasi mandiri dan siapa yang gratis saya belum tahu jumlahnya berapa,” kata Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji di Bangsal Wiyata Praja, Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (16/12).

Ditanya soal rumah sakit swasta yang telah membuka pemesanan vaksinasi Covid-19, Baskara Aji menyatakan, hal itu memang diperbolehkan. Karena skema vaksinasi itu ada dua, yang disediakan

Pemerintah dan diberikan secara cuma-cuma atau gratis, serta ada juga yang mandiri. Seandainya RS swasta menawarkan vaksin, mungkin konteksnya yang vaksinasi mandiri. “Bisa jadi RS swasta tersebut sudah memesan vaksin. Selama mereka bisa melaksanakan dengan baik, saya kira tidak ada masalah,” ujarnya.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih mengatakan, kasus positif Covid-19 di DIY terus bertambah. Per 16 Desember tambah 218 kasus menjadi 8.636 kasus. Sebagian besar berdomisili di Kabupaten Sleman sebanyak 99 orang, Bantul 65, Kota Yogya 36, Gunungkidul 12 dan Kulonprogo enam orang.

Sementara angka sembuh juga bertambah cukup banyak, 70 orang, sehingga menjadi 5.845 orang. Pasien sembuh terbanyak berdomisili di Bantul 25 orang, Kota Yogya 19, Sleman 16, Kulonprogo enam, dan Gunungkidul empat orang. Sementara kasus meninggal bertambah tiga orang menjadi 175 kasus. **(Ria/Ira)-d**

DALAM PENULARAN COVID-19

Mobilitas Berisiko Rendah Hingga Tinggi

JAKARTA (KR) - Tingginya mobilitas masyarakat di masa pandemi Covid-19 berisiko tinggi terhadap penularan. Hal itu perlu diantisipasi menjelang libur panjang akhir tahun yang bisa diprediksi terjadi lonjakan mobilitas masyarakat untuk bepergian silaturahmi maupun berwisata.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan, masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jika tidak mendesak. “Saya mengimbau masyarakat, jika perjalanan tidak mendesak, diharapkan tidak melakukannya,” kata Wiku dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (16/12).

Menurut Wiku, masyarakat juga diharapkan mengenali dengan baik risiko jenis mobilitas dan kegiatan yang dilakukan. Seperti kondisi dengan risiko terendah, yaitu beraktivitas di rumah dan hanya berinteraksi dengan keluarga inti dan melakukan perjalanan singkat dengan kendaraan pribadi dengan keluarga tanpa melakukan pemberhentian selama perjalanan.

Kondisi lebih berisiko, yaitu perjalanan

dengan kendaraan pribadi bersama keluarga tanpa melakukan pemberhentian selama perjalanan. Dan melakukan interaksi dengan bukan anggota keluarga inti di ruang terbuka dengan mematuhi 3M atau memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Kondisi lebih tinggi berisiko, yaitu perjalanan dengan kendaraan pribadi bersama bukan anggota keluarga, perjalanan kereta atau bus jarak jauh. Lalu, berinteraksi dengan beberapa orang yang bukan keluarga inti di ruang tertutup dengan sebagian besar mematuhi 3M.

Kondisi risiko tertinggi, yaitu perjalanan dengan transit, perjalanan dengan kapal atau perahu, dan berinteraksi dengan orang dari beragam sumber di ruangan tertutup dengan ventilasi buruk dengan sebagian kecil mematuhi 3M.

Untuk itu, terkait mitigasi risiko mobilitas, Pemerintah sedang memfinalisasi kebijakan terkait pelaku perjalanan antar-kota yang meliputi persyaratan sampai mekanisme perjalanan dan kembali ke tempat asalnya. **(San)-d**